



Awas, Iklan Jasa Aborsi Mulai Bermunculan

Polisi, Satpol PP Kota Yogyakarta Dilapori tapi Tak Merespons

YOGYAKARTA – Para pelaku jasa aborsi ilegal diduga kian berani terang-terangan berpromosi di wilayah publik sehingga menciptakan sampah visual yang marak di sudut persimpangan jalan Kota Yogyakarta.

Modusnya, mereka menawarkan jasa mengatasi datang bulan pada kaum hawa. Padahal, praktik sebenarnya mengindikasikan menawarkan jasa praktik aborsi.

Karena itu, Pemkot Yogyakarta diminta segera menertibkan iklan asusila yang mayoritas berbentuk poster tersebut. "Tulisannya memang singkat, 'telat datang bulan' dan nomor telepon. Tapi setelah kami telusuri dan menghubungi nomor tersebut, berindikasi itu modus untuk jasa aborsi," ungkap Koordinator Jogja Garuk Sampah Bakti Maulana saat mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Pakta Integritas Kota Yogyakarta kemarin.

Bekti mengaku komunitasnya terpaksa mengadu ke Forpi karena aduan yang dilayangkan sebelumnya ke Polresta, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta sama sekali tak direspons. Komunitasnya khawatir, sampah visual ini terus dibiarkan dapat mencoreng citra Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan.

Terlebih sampah visual yang ditempel di tiang *traffic light* itu mudah diakses oleh masyarakat usia dewasa hingga anak kecil. "Jika tak ada sikap tegas dari pemerintah, justru menimbulkan kesan pemerintah membiarkan budaya seks bebas dan tindak asusila. Pemerintah juga harus menelusuri pihak yang memasang iklan tersebut," desaknya.

Ke Hal 14

Awas, Iklan Jasa Aborsi Mulai Bermunculan

Dari Hal 13

Pegiat Jogja Garuk Sampah lainnya Khaerul mengaku, pihaknya bersama komunitas sosial kerap melakukan pembersihan secara mandiri. Namun, esok harinya kembali ditempel iklan serupa. "Warga sudah bergerak, tapi kesulitan, jadi sudah waktunya pemerintah turun tangan," desaknya juga.

Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Winarta Hadiwiyono berjanji akan menindaklanjuti aduan tersebut ke ins-

tansi terkait. Terutama Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian selaku pengampu layanan UPIK yang seharusnya mampu menjembatani keluhan warga ke pemerintah.

"Keluhan dan desakan dari elemen masyarakat ini memiliki nilai yang membangun. Seharusnya unsur pemerintah sigap karena sudah menjadi keresahan bersama. Iklan ini juga tidak mendidik dan berbahaya," tandasnya.

ristu hanafi

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☒ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☒ Segera	☒ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005